

MODAL SOSIAL JEJE-ADANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015

Ratnia Solihah

Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

E-mail: ratnia@unpad.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis modal sosial Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berhasilnya mereka dalam memenangkan kontes politik lokal (pilkada). Kepemilikan modal sosial Jeje-Adang dikaji melalui metode kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara secara *purposive* dan pemeriksaan dokumen-dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal sosial Jeje-Adang yang meliputi faktor ketokohan, kapabilitas dan integritasnya; kepercayaan dari masyarakat; interaksi sosial antara Jeje-Adang dengan pendukungnya; dan jaringan-jaringan sosial pendukung Jeje-Adang, berperan dalam perolehan kemenangan mereka.

Kata kunci: modal sosial; kandidat; pilkada

SOCIAL CAPITAL OF JEJE-ADANG IN THE 2015 REGIONAL HEAD ELECTION IN PANGANDARAN REGENCY

ABSTRACT

This paper analyzes Jeje-Adang's social capital in the 2015 Election of Pangandaran Regency as one of the factors that influenced their success in winning local political contests. The ownership of Jeje-Adang's social capital is assessed through qualitative methods with descriptive studies. The data were collected using a library study and field studies through purposive interviews and documents examination. The results of the study indicate that Jeje-Adang's social capital includes its characterization, capability, and integrity; trust from the community; social interaction between Jeje-Adang and his supporters; and social networks supporting Jeje-Adang, had contributed to their victory.

Key words: social capital; candidate; local election

PENDAHULUAN

Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 merupakan pilkada yang pertama kali dilangsungkan di Kabupaten Pangandaran yang baru dimekarkan dari Kabupaten Ciamis tahun 2013. Pilkada tersebut diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati-Wakil Bupati yaitu Pasangan H. Ino Darsono – dr. Erwin Thamrin, pasangan Hj. Azizah Talita Dewi, S.Sos., MM – Sulaksana, ST, MT dan pasangan H. Jeje Wiradinata – H. Adang Hadari. Dalam kontestasi politik tersebut Pasangan H. Ino Darsono – dr. Erwin Thamrin meraih 75.778 suara; pasangan Hj. Azizah Talita Dewi, S.Sos., MM – Sulaksana, ST, MT meraih 23.216 suara; dan pasangan H. Jeje Wiradinata – H. Adang Hadari meraih 140.481 suara. Berdasarkan raihan suara tersebut, pasangan H. Jeje Wiradinata – H. Adang Hadari memenangkan meraih suara sebanyak 58,66% dari total suara

sah dan sebagai pemenang kontestasi pada Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015. (KPU Kabupaten Pangandaran, 2016: 91).

Berhasilnya raihan suara yang lebih dari 50% pada Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 yang diselenggarakan dalam 1 (satu) putaran menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Jeje-Adang untuk menjadi pimpinan daerah di Kabupaten Pangandaran. Berhasilnya pasangan ini meraih suara secara signifikan dalam Pilkada Pangandaran salah satunya ditentukan oleh kepemilikan dan pemanfaatan modal sosial.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), modal sosial merupakan bangunan relasi dan kepercayaan yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat pemilihnya. Besarnya bangunan relasi dan kepercayaan masyarakat yang memilihnya merupakan modal sosial yang akan mempengaruhi peluang pasangan calon tersebut memenangkan kontestasi politik lokal tersebut.

Modal sosial memiliki peran yang sangat penting bahkan tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal yang lain. Dengan memiliki modal sosial yang tinggi, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih (*voters*). Namun melalui pengenalan-pengenalan itu, lebih-lebih pengenalan secara fisik dan sosial secara dekat, para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu layak untuk dipilih atau tidak. Apabila seorang calon dikatakan memiliki modal sosial, berarti calon itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat, tetapi juga diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin.

Kajian tentang modal dalam kaitannya dengan kontestasi politik antara lain dilakukan oleh Mimin Anwantinna (2013) dengan judul “Kemenangan Anton-Sutiaji (Aji) Dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Malang Tahun 2013” yang menunjukkan bahwa Kemenangan Anton-Sutiaji dilihat dari konsepsi modal Pierre Bourdieu. Modal yang dimaksud kemudian di klasifikasikan menjadi lima bagian yaitu, modal sosial, modal simbolik, modal ekonomi, modal budaya dan modal politik. Di samping itu, peneliti juga menggunakan teori strategi politik sebagai teori pendukung. Modalitas yang dimiliki Anton-Sutiaji mampu dimanfaatkan secara maksimal dengan di dukung penggunaan strategi politik yang tepat sehingga keduanya berhasil memenangkan Pemilihan Walikota di Kota Malang tersebut.

Kajian lainnya dilakukan oleh Abdul Rasyid (2010) dengan judul “Modalitas dan Kontestasi Politik: Studi tentang Modalitas dan Strategi Pemenangan Pilkada pada Pasangan Kandidat Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M.Si Dan Drs. H. Azhar Bahruddin, M.AP dalam Pilkada 2010 Di Kabupaten Paser Kalimantan Timur”. Hasil kajian menunjukkan bahwa pasangan kandidat Yus-Azhar dalam pilkada Kabupaten Paser menggunakan kekuatan modal politik, modal ekonomi dan modal sosial yang bersandar pada kekuatan yang dimiliki oleh kandidat, tim pemenangan, elit politik dan tokoh masyarakat, serta orang-orang terdekatnya yang berperan dan memiliki pengaruh untuk mendulang suara lebih banyak. Masing-masing peran tersebut untuk memperoleh dukungan atau suara dari pemilih dengan *networking*, *image building* dan mobilisasi, baik itu basis massa dari pilkada 2005 yang pernah diikuti Yusriansyah, basis massa partai pengusung, ormas yang mendukung melalui

tokoh-tokoh masyarakat, dan semua strategi yang dijalankan juga oleh tim pemenangan Yus-Azhar dengan dukungan dana politik baik dari pribadi maupun dari donatur baik secara pribadi dan pengusaha lokal.

Kajian lainnya oleh Tawakkal Baharuddin dan Titin Purwaningsih (2015) berjudul “Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Kasus: Indah Putri Indriani sebagai Bupati Terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan), menunjukkan bahwa Indah Putri Indriani memiliki modal lebih dalam Pemilukada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015, yaitu modal sosial, modal budaya, modal politik dan modal ekonomi. Dari ke-4 modal tersebut modal politik merupakan modal paling dominan, karena adanya dukungan dari elit politik lokal yaitu Luthfi A. Mutty sebagai mantan bupati dua periode (2000-2005 dan 2005-2010) di Kabupaten Luwu Utara dan adanya pengaruh dari pasangan Indah Putri Indriani pada pemilukada yaitu wakil bupati terpilih Muh. Thahar Rum yang berlatar belakang sebagai seorang birokrat sekaligus mantan anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara, sekaligus memiliki pengalaman dalam sebuah kontestasi politik pada periode pemilukada sebelumnya.

Kajian modal dalam kontestasi politik juga dilakukan oleh Putri, M. dan Z. Qodir. (2017) dengan judul “Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015”. Faktor Kemenangan koalisi Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilu kepala daerah Kabupaten Bantul tahun 2015 dipengaruhi oleh beberapa modal, yaitu: (a) Modal politik yang dimiliki oleh pasangan Suharsono-Halim dalam pemenangan pemilukada kabuapten Bantul meliputi kemampuan membaca isu politik, memahami dinamika politik, dan adanya koalisi partai dan relawan yang konsisten dalam mendukung pasangan Suharsono Halim di pemilukada. (b) Modal sosial, yang meliputi basis massa yang terdiri dari keluarga, organisasi-organisasi masyarakat yang berhasil dirangkul, dan figur ketokohan yang dimiliki pasangan ini, dimana Suharsono dan Halim merupakan bagian dari pengurus dari Nahdatul Ulama (NU) yang menjadi basis masa di Kabupaten Bantul. (c) Modal ekonomi, menunjukkan bahwa pasangan Suharsono-Halim memiliki modal ekonomi yang digunakan untuk membiayai operasionalisasi

kampanye serta memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa kajian terdahulu tentang modal dalam kontestasi politik (pilkada) tersebut, secara umum beberapa pasangan kandidat memiliki modal politik, modal ekonomi dan modal sosial yang menjadi faktor dalam memenangkan pilkada. Namun fokus kajian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu lebih mendeskripsikan kepemilikan modal politik, modal ekonomi dan modal sosial tersebut secara parsial (masing-masing), tidak mengungkapkan adanya keterkaitan antara satu modal dengan modal-modal yang lainnya.

Kajian ini lebih menjelaskan bagaimana modal sosial yang dimiliki Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 merupakan faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan ini dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015, yang juga turut mempengaruhi kepemilikan modal politik dan modal ekonomi ekonomi pasangan tersebut.

Untuk mengkaji bagaimana peran modal sosial dalam memberikan kemenangan kepada Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tersebut, dalam tulisan ini akan dibahas tentang Modal Sosial Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015.

Dalam kajian ini, modal sosial merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya atau kepemilikan modal awal yang dimiliki kandidat dalam upaya melakukan strategi politik dalam kontestasi politik. Strategi adalah seperangkat aktivitas yang digunakan untuk merencanakan, menentukan dan mengevaluasi berbagai cara untuk mencapai misi dan tujuan yang diharapkan. Strategi adalah suatu alat dan cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Strategi politik kemudian diartikan sebagai alat politik untuk mendapatkan sesuatu, baik itu mendapatkan kemenangan, jabatan, dan kekuasaan (Solihah, 2016: 119).

Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang bisa digunakan sebagai investasi untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama di dalam kelompok, dan juga dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Modal sosial di sini tidak diartikan dengan materi, tetapi merupakan modal sosial yang terdapat pada seseorang, pada kelompok institusi keluarga, organisasi, dan semua hal yang dapat mengarah pada kerjasama.

Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar individu dalam suatu kelompok dan antar kelompok, dengan ruang perhatian pada kepercayaan, jaringan, norma dan nilai yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok (Field, 2010: 17-18).

Konsep modal dalam konteks politik antara lain dikemukakan oleh Birner dan Witmer (2007). Birner dan Witmer menjadikan konsep modal politik yang memungkinkan untuk mengkaji masyarakat lokal menggunakan modal sosial untuk mencapai sasaran hasil politik. Berbagai kerja politik dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mendukung kegiatan-kegiatan politik seperti mobilisasi suara pemilih, partisipasi langsung dalam proses legislasi, protes/demonstrasi, lobi, serta membangun wacana sebagai modal politik untuk membangun demokrasi. Dengan demikian adanya pemanfaatan/penggunaan modal sosial untuk mencapai tujuan tertentu melalui langkah-langkah perubahan menjadi modal politis. Modal sosial ini dikembangkan menjadi modal politik berupa lobi-lobi politik dan keleluasaan ekonomi yang memperlancar lobi-lobi politik. Lebih lanjut Birner dan Wittmer mengemukakan adanya beberapa sarana lain yang merupakan sarana/saluran pengubah modal sosial menjadi modal politik, yaitu pemilihan umum, partisipasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, tekanan massa, negosiasi puncak organisasi, lobi, memanfaatkan ilmu pengetahuan, penggunaan (identitas) ideologis, tekanan pihak internasional, dan intervensi pemegang otoritas.

Dalam konteks pilkada, modal sosial berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk di dalamnya adalah sejauh mana pasangan calon itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin daerahnya dan memiliki integritas yang baik. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa didahului oleh adanya perkenalan. Tetapi, keterkenalan atau popularitas saja kurang bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya integritas (Marijan, 2010: 91).

Dalam Pilkada, modal sosial memiliki peran yang sangat penting, bahkan tidak kalah pentingnya kalau dibandingkan dengan modal politik. Melalui modal sosial yang dimiliki, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih.

Lebih dari itu, melalui pengenalan itu, lebih-lebih pengenalan yang secara fisik dan sosial berjarak dekat, para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu benar-benar layak untuk dipilih atau tidak. Seseorang dikatakan memiliki modal sosial, berarti calon itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat melainkan juga diberi kepercayaan. Saat ini, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berlogika: bagaimana para kandidat mampu mempengaruhi dan merebut hati rakyat. Sebaliknya, rakyat akan memberikan hak pilihnya pada kandidat yang sudah dia kenal, dalam pengertian lain, bahwa jauh sebelumnya, kandidat tersebut sudah memiliki modal sosial di tengah-tengah masyarakat. Jika kandidat belum memiliki modal sosial, dan baru memperkenalkan diri sesaat menjelang dilaksanakannya Pilkada, dapat dipastikan bahwa kandidat tersebut sulit mendapatkan dukungan yang mayoritas dari masyarakat (Marijan, 2010: 92).

Terkait dengan modal sosial dalam pilkada, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh berkualitas atau tidaknya calon pemimpin daerah. Calon pemimpin yang berkualitas akan mendapat dukungan dari masyarakat pemilih. Dalam menentukan pilihannya, masyarakat akan melihat integritas seorang calon pemimpin.

Integritas (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 437) adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Calon yang memiliki integritas akan mendapat mandat dari rakyatnya.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohnya, kapabilitas dan integritasnya, sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat yang menciptakan interaksi sosial antara kandidat dengan pendukungnya, serta adanya jaringan-jaringan sosial yang mendukungnya.

METODE

Dalam kajian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposif* sebagai sumber data primer serta

melalui dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti sebagai sumber data sekunder. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mereview literature yang terkait dengan kajian ini.

Informan dalam penelitian ini meliputi: Bupati Kabupaten Pangandaran periode 2016-2021, Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran periode 2016-2021, Ketua KPUD Kabupaten Pangandaran, Pimpinan Partai Politik pendukung Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran, Perwakilan Komunitas Masyarakat dan Perwakilan Sukarelawan pendukung Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran, Tokoh masyarakat, dan Media Massa Lokal.

Pada teknik analisis data, dilakukan tiga alur kegiatan yaitu, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992: 16-21). Sedangkan dalam memvalidasi data digunakan teknik triangulasi sumber dengan mengecek data dari sumber informan yang berbeda maupun triangulasi teknik dengan mengecek data dengan teknik yang berbeda.

Modal Sosial Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran 2015

Modal sosial Jeje-Adang dinilai sebagai modal kuat pasangan tersebut yang menentukan kemenangan dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 (Solihah dkk, 2018: 384).

Modal sosial Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran 2015 dapat dikaji melalui:

- Dukungan figur Jeje-Adang karena ketokohnya, kapabilitasnya dan integritasnya;
- Kepercayaan dari masyarakat terhadap Jeje-Adang;
- Interaksi sosial antara Jeje-Adang dengan pendukungnya;
- Jaringan-jaringan sosial yang mendukung Jeje-Adang

Dukungan Figur Jeje-Adang karena Ketokohnya, Kapabilitasnya dan Kredibilitasnya

Pemilihan kepala daerah merupakan arena kontestasi politik dengan kompetisi antara pasangan calon (kandidat). Kompetisi yang terjadi dipengaruhi oleh kapasitas figur masing-masing pasangan calon kepala daerah. Kompetisi yang terjadi bukan saja persaingan antar partai politik, namun yang lebih menonjol adalah figur kandidat tersebut seperti ketokohan,

kapasitas, kredibilitas, popularitas, pengalaman politik, latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang menjadi faktor adanya modal sosial dalam kontestasi politik.

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Putri dan Qodir (2017: 155-156) bahwa modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang bisa digunakan sebagai investasi untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan bersama di dalam kelompok. Sumberdaya sosial tersebut dapat dikategorikan seperti tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di lingkungan masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, organisasi pemuda, profesi dan sebagainya). Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan kemenangan pemilu, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

Mengenai berperannya figur kandidat sebagai faktor yang mempengaruhi dukungan masyarakat dalam kontestasi politik, juga diungkapkan Widagdo (2016: 191) bahwa peran seorang tokoh dalam proses pemilu selalu dibutuhkan, bahkan memiliki peran yang sangat signifikan terutama untuk mempengaruhi pemilih. Pada pemilu legislatif, ketokohan pemimpin partai dan calon anggota legislatif memiliki potensi dalam mempengaruhi perilaku pemilih untuk memutuskan apakah memilih partai atau calon dari partai tokoh yang bersangkutan. Demikian juga pada pemilihan kepala daerah, ketokohan dari calon gubernur atau bupati/walikota dapat dijadikan sebagai modal untuk mempengaruhi pemilih.

Terkait dengan figur kandidat (calon) karena ketokohnya, kapabilitasnya dan integritasnya, dapat dimaknai bahwa kandidat (calon) tersebut memiliki kredibilitas yang dapat mempengaruhi dukungan pemilihnya. Kredibilitas kandidat (calon) dapat dengan mudah dinilai oleh pemilih, mengingat antara calon dan anggota masyarakat pemilih sudah ada interaksi dan kebanyakan sudah saling mengenal. Pendapat mengenai pentingnya kredibilitas calon diungkapkan oleh Firmanzah (2012), bahwa kredibilitas terkait dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki seseorang (calon/kandidat). Pentingnya kemampuan dan kapasitas orang atau kandidat merupakan faktor yang menentukan bagi masyarakat dalam memilih partai politik atau kandidat.

Dalam pilkada Kabupaten Pangandaran 2015, modal sosial juga menjadi salah satu andalan atau faktor yang mempengaruhi pasangan calon Bupati-Wakil Bupati dalam memenangkan pilkada tersebut, yaitu bagi Jeje-Adang.

Berdasarkan hasil kajian, figur Jeje-Adang dalam pilkada Pangandaran 2015 merupakan figur calon pemimpin yang dekat secara fisik, sosial maupun emosional bagi masyarakat Pangandaran. Jeje dinilai sebagai sosok pemimpin yang loyal, memasyarakat dan sering bergaul/berinteraksi dengan seluruh kalangan masyarakat, tanpa membedakan statusnya sebagai pimpinan, menjadikannya disukai dan dikenal oleh sebagian besar masyarakat Pangandaran. Begitu juga dengan sosok Adang yang dikenal sebagai pengusaha sukses dan sebagai tokoh masyarakat Pangandaran yang dekat dengan masyarakat, sering membantu masyarakat dan berjiwa sosial, menjadikannya juga dinilai sangat pantas untuk dijadikan pemimpin di daerahnya.

Selain menilai figur pribadi Jeje-Adang, kapasitas dan pengalaman politik/pemerintahan juga menjadi dasar pertimbangan mendukung pasangan tersebut dalam pilkada Pangandaran. Kapasitas politik Jeje dinilai baik dan mumpuni, dimana karir politiknya sudah dijalannya cukup lama mulai dari tahun 1999 sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, sebagai Ketua DPC PDIP Ciamis, dan menjadi Wakil Bupati Ciamis pada tahun 2012. Selama menjalani karir politik tersebut, Jeje juga dianggap mampu menjalankan perannya sebagai politisi yang dekat dengan masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui kiprahnya dalam membentuk dan membesarkan beberapa komunitas masyarakat Pangandaran, tidak saja secara formal menduduki jabatan sebagai pimpinan beberapa komunitas masyarakat, namun juga karena kemampuannya mengelola komunitas-komunitas tersebut sehingga keberadaan komunitas-komunitas di Pangandaran yang dipimpinnya dapat berkembang dan menjalankan aktivitasnya dengan baik.

Salah satu komunitas yang merasakan adanya peran dan kontribusi Jeje dalam pengembangan dan keberadaan komunitasnya adalah KUD Minasari yang pada beberapa tahun yang lalu mengalami pailit (usaha dan aktivitas KUD tidak jalan). Berkat Jeje yang mengambil alih usaha tersebut sekaligus dan kemudian

mengelolanya, KUD Minasari akhirnya bangkit kembali dari keadaan pailit tersebut. Bahkan sekarang usahanya berkembang semakin baik, sangat membantu kebutuhan dan kesejahteraan para nelayan Pangandaran. Selain itu KUD Minasari juga memiliki usaha lain selain untuk memenuhi kebutuhan nelayan, yaitu memiliki rumah makan Minasari di Pangandaran.

Selain KUD Minasari, peran Jeje juga dinilai penting oleh komunitas-komunitas nelayan, dimana saat menjabat sebagai politisi di Ciamis Jeje juga membentuk Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pangandaran, dimana beliau menjadi ketua HNSI tersebut. Kemampuannya memahami komunitas tersebut di latarbelakangi oleh sosoknya sebagai anak seorang nelayan dan sering berinteraksi dengan nelayan-nelayan di Pangandaran. Beliau adalah aktivis nelayan, tokoh dan sangat terkenal di kalangan nelayan. Oleh karenanya ada semacam keterikatan emosional antara Jeje dengan para nelayan.

Sementara, sosok Adang dikenal sebagai tokoh masyarakat yang sudah lama berkiprah dalam bidang kesehatan. Selama menjadi PNS dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1999, Adang lebih banyak menjalankan tugas PNSnya di Puskesmas Pangandaran. Dengan begitu masyarakat mengenal kapasitas dan pengalaman Adang yang cukup baik dalam bidang pemerintahan, khususnya terkait dengan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Selain itu, masyarakat juga mengenal Adang sebagai tokoh masyarakat yang menjadi pengusaha sukses dengan berbagai usahanya di Pangandaran, seperti Hotel Sandaan, Klinik Bahkti Sandaan dan PT. Marga Asli (perusahaan bidang kontruksi/bahan bangunan). Mengenai kapasitas politiknya, Adang dikenal sebagai tokoh senior Partai Golkar yang aktif dalam politik sejak pensiun tahun 1999. Selain itu juga dikenal sebagai tokoh masyarakat yang berperan dalam pemekaran Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan figur, kapasitas dan pengalaman politiknya, Jeje-Adang sama-sama dikenal masyarakat sebagai calon figur pemimpin yang baik dan dekat dengan masyarakat, memiliki kapasitas politik dan pemerintahan yang terlihat dari pengalaman politik dan pengalaman pemerintahan keduanya selama ini. Selain itu, keduanya juga dinilai memiliki integritas yang baik dalam kiprahnya sebagai tokoh masyarakat, tokoh politik, karir di pemerintahan dan di

kemasyarakatan. Hal tersebut yang menjadikan keduanya dipercaya dan didukung oleh masyarakat (baik masyarakat secara perorangan maupun komunitas-komunitas), untuk menjadi calon pemimpin daerah di Kabupaten Pangandaran. Adanya dukungan masyarakat terhadap Jeje-Adang tersebut karena dimilikinya figur ketokohan, kapasitas dan pengalaman politiknya, serta latar belakang karirnya yang memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin daerah.

Kondisi tersebut sejalan dengan yang kemukakan oleh Ali (2010) dimana ketokohan secara signifikan mempengaruhi sikap masyarakat untuk menentukan keputusan memilih. Tokoh yang dinilai kredibel, memiliki kemampuan yang memadai dan didukung oleh kepribadian yang baik akan memunculkan sikap positif pemilih terhadap tokoh politik, seperti dalam bentuk sikap mendukung dan merekomendasikan orang lain untuk memilihnya.

Dengan dimilikinya figur ketokohan oleh Jeje dan Adang yang memenuhi kriteria calon pemimpin daerah sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat Pangandaran, keduanya memiliki modal sosial yang cukup besar untuk mengikuti kontestasi politik (pilkada) Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya aspirasi dan dukungan masyarakat terhadap Jeje-Adang dalam proses kandidasi oleh partai-partai politik. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan dan alasan diusungnya dan didukungnya Jeje-Adang oleh koalisi partai PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKS.

Terkait dengan berperannya figur ketokohan Jeje dan Adang sebagai salah satu unsur modal sosial pasangan tersebut, juga dapat dilihat melalui berbagai survey tentang calon pemimpin yang layak menjadi pemimpin daerah Pangandaran dan harapan-harapannya terhadap pemimpin tersebut, yang dilakukan terhadap masyarakat oleh berbagai lembaga survey independen. Hasil semua survey tersebut memperlihatkan tingginya elektabilitas Jeje-Adang untuk menjadi pemimpin Pangandaran. Hasil survey ini dijadikan sebagai dasar bagi partai-partai politik besar tersebut dalam mengusung dan mendukung Jeje-Adang untuk maju dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Dengan kata lain, kepemilikan modal sosial Jeje-Adang mempengaruhi perolehan modal politik pasangan tersebut dalam proses

pencalonannya sebagai kandidat Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2015.

Kepercayaan dari Masyarakat terhadap Jeje-Adang

Keanggotaan seorang aktor dalam suatu kelompok, memberikan hak pada tiap anggotanya dukungan modal yang dimiliki secara kolektif serta adanya kepercayaan yang memungkinkannya mendapatkan kredit (nilai) dalam berbagai hal. Kepemilikan modal sosial yang berupa organisasi sosial, kekerabatan dan keterikatan antara aktor dan masyarakat di sekitarnya lebih memudahkan dalam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, karena sudah lama saling mengenal dan ada hubungan timbal balik.

Terakumulasinya semua modal, baik adanya kepercayaan pada aktor maupun adanya hubungan timbal balik, dapat memberikan dukungan di berbagai bidang dalam arena politik aktor. Jalinan hubungan yang baik itu jika terus dibina secara berkelanjutan, maka aktor yang telah lama membangun jalinan pertemanan dengan masyarakat akan memiliki pengaruh dan kedekatan khusus pada masyarakat.

Adanya kedekatan khusus baik secara fisik, sosial maupun emosional antara kandidat dengan masyarakat memunculkan sikap dan perasaan percaya dari masyarakat terhadap kandidat tersebut yang akhirnya akan dapat merebut hati masyarakat untuk mendukung kandidat yang bersangkutan bila menjadi pemimpinnya.

Terkait dengan hal di atas, logika pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah bagaimana para kandidat mampu mempengaruhi dan merebut hati rakyat. Sebaliknya, rakyat akan memberikan hak pilihnya (memberikan suaranya) pada kandidat yang sudah dia kenal. Dengan kata lain, kandidat tersebut harus memiliki modal sosial untuk memperoleh dukungan suara dalam pilkada. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Marijan (2010: 92) bahwa untuk dapat dukungan rakyat dalam pilkada, jauh sebelumnya, kandidat tersebut sudah memiliki modal sosial di tengah-tengah masyarakat. Jika kandidat belum memiliki modal sosial, dan baru memperkenalkan diri sesaat menjelang dilaksanakannya Pilkada, dapat dipastikan bahwa kandidat tersebut sulit mendapatkan dukungan yang mayoritas dari masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap Jeje-Adang sudah terbangun sejak lama, sejak

beberapa tahun sebelum dilangsungkannya pilkada Pangandaran tahun 2015, selama Jeje berkiprah dalam politik (1999-2014) dan juga selama Adang berkiprah dalam pemerintahan (1978-1999), sebagai pengusaha dan sebagai tokoh masyarakat Pangandaran yang dikenal dekat dengan masyarakat (1999-2014).

Dengan melihat jangka waktu Jeje dan Adang berkiprah dalam bidang politik, pemerintahan dan kemasyarakatan sampai mereka menjadi pasangan kandidat bupati Pangandaran tahun 2015, hal tersebut menunjukkan bahwa Jeje dan adang sama-sama memiliki modal sosial yang cukup besar, yang diperolehnya tidak secara "instan". Namun sudah dibangun sejak mereka berkiprah dalam karir politik dan karir pemerintahan, maupun sebagai tokoh masyarakat yang disegani oleh masyarakat Pangandaran jauh sebelum akan dilangsungkannya Pilkada Pangandaran tahun 2015.

Terkait dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap Jeje-Adang, dapat dilihat dari pemaparan di bagian sebelumnya, dimana masyarakat menilai sosok Jeje dan Adang sebagai figur pemimpin yang dekat dengan masyarakat secara fisik, sosial maupun emosional.

Sosok Jeje sebagai putra daerah Pangandaran yang merupakan anak nelayan Pangandaran, lebih dipercaya sebagai pemimpin daerah Pangandaran oleh sebagai besar masyarakat Pangandaran dibandingkan dengan sosok kandidat lainnya. Karena selain memiliki kapasitas politik dan pengalaman pemerintahan sebagai Wakil Bupati Ciamis, Jeje juga dinilai mampu memahami kondisi dan keinginan masyarakat Pangandaran, khususnya masyarakat nelayan yang notabene merupakan lingkungan masyarakat yang dekat dengan Jeje selama hidupnya. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap jeje terbentuk karena terjalinnya hubungan interaktif dengan baik dan komunikatif antara kedua belah selama Jeje berkiprah sebagai politisi di Ciamis, yakni Jeje sebagai anggota legislatif (politisi) dan masyarakat Pangandaran sebagai konstituennya. Beberapa kondisi tersebut memunculkan kepercayaan pada sosok Jeje, yang tidak saja muncul dari kalangan masyarakat nelayan, namun juga kalangan masyarakat lainnya yaitu pedagang, petani dan pengelola usaha wisata yang melihat Jeje sebagai salah satu putra daerah Pangandaran yang berhasil mengangkat nama Pangandaran ke luar daerah lainnya. Hampir seluruh informan dalam kajian ini menilai Jeje sebagai sosok tokoh/

pemimpin yang selalu hadir dalam berbagai acara masyarakat di Pangandaran (baik masyarakat kalangan bawah, kalangan menengah maupun kalangan atas), dengan pribadinya yang dinilai “supel” dan pandai bergaul dengan berbagai kalangan masyarakat manapun, termasuk juga akrab dengan wartawan dan banyak pemangku kepentingan.

Sementara itu, sosok Adang, dinilai sebagai tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dan dikenal dekat dengan masyarakat. Sosok Adang selama ini bahkan sebelum pilkada dilangsungkan dikenal sebagai pengusaha sukses yang berjiwa sosial atau dermawan, yang sering membantu masyarakat. Dia juga sering datang menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat kalangan bawah. Hal tersebut menjadi sebab besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Adang untuk menjadi pemimpin daerah Pangandaran mendampingi Jeje, yang diharapkan dapat membangun Pangandaran dan memajukan masyarakat Pangandaran setelah adanya pemekaran Kabupaten Pangandaran.

Kepercayaan masyarakat terhadap Adang juga muncul karena sosok Adang sebagai tokoh masyarakat Pangandaran yang sangat berpengaruh serta sebagai salah satu anggota presidium Pangandaran yang berperan mempersiapkan dan menjalankan segala bentuk upaya dalam memekarkan Pangandaran dari Kabupaten Ciamis sebagai Daerah Otonom Baru.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa baik Jeje maupun Adang, merupakan sosok kandidat yang dinilai memiliki kriteria sebagai pemimpin yang dekat secara fisik, sosial dan emosional dalam berbagai bentuk hubungan antara keduanya dengan berbagai kalangan masyarakat yang akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sosok Jeje dan Adang sebagai pemimpin daerah Pangandaran dibandingkan dengan sosok kandidat lainnya.

Kondisi ini juga tercermin dengan hasil survey Tingkat Akseptabilitas Kandidat dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 yang dilakukan oleh Lamda Survey Indonesia (Solihah, dkk, 2018: 387). Menurut hasil survey tersebut, tingkat akseptabilitas Jeje Wiradinata (83,9%) dan Adang Hadari (75%) berada pada urutan pertama dan kedua dibandingkan dengan tingkat akseptabilitas kandidat lainnya yaitu Azizah Talita Dewi (73%), Erwin Thamrin (59%), Ino Darsono (55,8%) dan Cucu

Sulaksana (43,9%). Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap sosok kandidat Jeje dan Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran lebih tinggi daripada sosok kandidat lainnya. Tingkat akseptabilitas (penerimaan masyarakat) ini merupakan salah satu parameter adanya kepercayaan masyarakat terhadap kandidat tersebut.

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Jeje-Adang tersebut diperoleh tidak instan menjelang dan saat akan dilangsungkannya pilkada tersebut, sebagaimana banyak terjadi pada beberapa pilkada yang mengandalkan popularitas kandidat melalui media sosial ataupun media massa, atau yang mengandalkan strategi politik dan bekerjanya mesin politik partai; namun dukungan masyarakat lebih karena adanya faktor kepercayaan masyarakat terhadap Jeje-Adang tersebut, yang sudah terbangun beberapa tahun sebelumnya. Kepercayaan tersebut yang menjadi modal sosial Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran, yang menjadi salah satu latar belakang diusung dan didukungnya Jeje-Adang oleh partai-partai politik besar (PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS) di Pangandaran. Dengan demikian modal sosial yang dimiliki Jeje-Adang tersebut mempengaruhi perolehan modal politik dan yang menjadi faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan tersebut dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapatlah ditunjukkan bahwa modal sosial berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk di dalamnya adalah sejauh mana pasangan calon itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin daerahnya dan memiliki integritas yang baik. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa didahului oleh adanya pengenalan. Tetapi, keterkenalan atau popularitas saja kurang bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya integritas (Marijan, 2010: 91). Dalam beberapa hal, apa yang dilakukan oleh Jeje dalam kiprahnya selama menjadi wakil rakyat (anggota dan Ketua DPRD Ciamis) dan Wakil Bupati Ciamis serta oleh Adang sebagai anggota presidium Pangandaran yang berperan sebagai tokoh pemekaran Kabupaten Pangandaran merupakan bentuk dimilikinya integritas yang baik oleh Pasangan Jeje-Adang tersebut.

Interaksi Sosial antara Jeje-Adang dengan Pendukungnya

Modal sosial adalah segala jenis hubungan sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial (2014: 110). Menurut Bourdieu (dalam Ritzer dan Goodman, 2009: 583), modal sosial sejatinya merupakan hubungan sosial bernilai antar orang. Hal tersebut bisa dicontohkan sebagian masyarakat yang berinteraksi antar kelas dalam lapisan sosial masyarakat.

Modal sosial pada hakekatnya merupakan hubungan sosial atau interaksi sosial di antara anggotanya (personalnya) dalam lingkungan sosialnya, dapat berupa hubungan sosial antar kelas/kelompok dan organisasi sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat maupun antara personal dengan kelompok dan organisasi sosial tersebut, baik dalam proses negosiasi maupun proses adaptasi.

Dalam konteks kontestasi politik (pilkada), modal sosial kandidat (calon/pasangan calon) akan terbangun bila antara kandidat (calon/pasangan calon) dengan pihak yang lainnya (masyarakat) terjadi interaksi sosial. Interaksi sosial yang dilakukan oleh kandidat akan mempengaruhi proses dukungan masyarakat terhadap kandidat (calon/pasangan calon) dalam kontestasi politik. Dalam hal ini dapatlah dikemukakan bahwa interaksi yang terjalin dengan baik antara kandidat (calon/pasangan calon) dengan masyarakat (calon pemilihnya) akan memunculkan persepsi, penilaian dan respon yang baik dalam pandangan masyarakat tersebut. Sebaliknya, bila interaksinya kurang terjalin dengan baik antara kandidat (calon/pasangan calon) dengan masyarakat (calon pemilihnya) akan memunculkan persepsi, penilaian dan respon yang kurang baik pula dalam pandangan masyarakat tersebut.

Oleh karenanya, salah satu unsur munculnya perolehan modal sosial adalah karena adanya interaksi yang dilakukan oleh kandidat (calon/pasangan calon) dengan masyarakat. Dengan memiliki modal sosial yang tinggi, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih (*voters*). Namun karena secara fisik dan sosial, kandidat tersebut dinilai dekat dengan pemilihnya, dalam arti adanya interaksi antara kandidat dengan calon pemilihnya; sehingga para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu layak untuk dipilih atau tidak.

Terkait dengan konteks perolehan modal sosial dalam arti adanya interaksi yang dilakukan

oleh kandidat dengan calon pemilihnya dalam kontestasi politik (pilkada), dapat dimaknai bahwa untuk memperoleh modal sosial, tidak terlepas dari berbagai interaksi yang telah dijalani kandidat (calon/pasangan calon) dengan para pemilihnya. Hal tersebut juga berlaku dalam proses perolehan modal sosial Jeje-Adang dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015, dimana interaksi-interaksi yang telah dilakukannya selama ini dengan masyarakat menjadi faktor terbentuknya modal sosial pasangan tersebut.

Berdasarkan hasil kajian, menunjukkan bahwa interaksi sosial yang dilakukan Jeje dan Adang dengan masyarakat Pangandaran menjadi salah satu faktor terbentuknya perolehan modal sosial Jeje dan Adang, yang sudah dibangunnya beberapa tahun sebelum Pilkada Pangandaran tahun 2015. Interaksi Jeje dengan masyarakat dilakukan dengan seringnya beliau menghadiri pertemuan-pertemuan warga, bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat Pangandaran selama beliau berkiprah sebagai wakil rakyat (anggota dan Ketua DPRD Ciamis) juga saat beliau menjadi Wakil Bupati Ciamis, seringnya beliau “nongkrong dan ngobrol bareng” dengan masyarakat kalangan manapun tanpa melihat status sosial apakah dia pejabat atau bukan, serta dirangkulnya semua kalangan masyarakat dan sering dibantunya warga/masyarakat yang kesulitan dan membutuhkan bantuannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Adang dalam interaksinya dengan warga (masyarakat) Pangandaran selama beliau berkiprah dalam pemerintahan, terutama saat bertugas di puskesmas Parigi dan Puskesmas Pangandaran selama hampir 20 tahun. Selain juga interaksinya sebagai tokoh masyarakat Pangandaran yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses Pangandaran yang sering membantu warga (masyarakat) Pangandaran yang kesusahan dan seringnya beliau memberikan bantuan materi untuk kegiatan-kegiatan warga di sekitar Pangandaran.

Interaksi sosial yang dilakukan Jeje-Adang dengan masyarakat Pangandaran sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa proses pembentukan modal sosial bagi Jeje maupun Adang yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun, selama mereka berkiprah menjadi warga/tokoh masyarakat Pangandaran maupun selama mereka berkarir dalam bidang politik dan pemerintahan. Interaksi dengan

warga (masyarakat) yang dilakukannya tidak hanya menjelang, saat atau selama tahapan dilangsungkannya kontestasi politik (pilkada), namun sudah dijalaninya bertahun-tahun lamanya, sehingga muncul kedekatan secara fisik, sosial dan emosional. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya dukungan warga (masyarakat) baik perorangan maupun kelompok (komunitas-komunitas masyarakat) terhadap Jeje dan Adang untuk menjadi Pemimpin Daerah di Pangandaran beberapa bulan sebelum proses pencalonan dan pengusungan oleh partai-partai politik dilakukan.

Interaksi sosial yang dilakukan oleh Jeje dan Adang tidaklah semata-mata sebatas hubungan sosial antara pemimpin atau tokoh masyarakat dengan warga masyarakatnya, ataupun sebagai sesama warga masyarakat Pangandaran. Namun memiliki nilai lebih sebagai bentuk hubungan interaksi yang terjalin antara wakil rakyat (anggota DPRD) dengan konstituennya, dan antara wakil Bupati dengan masyarakatnya.

Hubungan interaksi antara Jeje dengan masyarakat Pangandaran antara lain dapat dilihat dari peran Jeje dalam melahirkan atau membentuk berbagai himpunan masyarakat (komunitas masyarakat) di Pangandaran.

Komunitas masyarakat yang didirikannya antara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), dan KUD Minasari. Komunitas-komunitas masyarakat tersebut menjadi wadah anggotanya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan mata pencaharian sehari-hari anggotanya maupun dalam mengembangkan usahanya.

Peran Jeje dalam HNSI, selain sebagai pendiri juga menjadi Ketua HNSI Pangandaran. Kedudukannya sebagai wakil Bupati Ciamis saat itu, menjadikannya relatif lebih mudah dalam membuat program kebijakan yang mendukung keberlangsungan organisasi HNSI ini, dimana melalui perannya sebagai Bupati Ciamis sekaligus sebagai ketua HNSI, Jeje berhasil mengembangkan HNSI ini menjadi salah satu organisasi nelayan terbesar dan terbanyak anggotanya di Pangandaran yang memberikan berbagai bantuan sarana-prasarana bagi nelayan Pangandaran.

Interaksi Jeje dengan komunitas masyarakat lainnya juga dirasakan oleh kalangan petani Pangandaran yang tergabung dalam komunitas Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA). Salah

satu bentuk interaksi yang dilakukan jeje dengan komunitas ini, adalah dalam penyediaan pupuk gratis bagi petani di saat harga pupuk tersebut sedang mahal dan kurang terjangkau oleh para petani.

Sementara itu, interaksi Jeje juga dilakukan dengan masyarakat yang terhimpun sebagai anggota KUD Minasari. Jeje bereperan dalam menyelamatkan KUD tersebut dari kebangkrutan pada tahun 2012 saat Jeje menjadi Wakil Bupati Ciamis. Peran dan interaksinya tidak hanya sebatas menyelamatkan KUD tersebut, namun juga berinteraksi dengan anggota-anggotanya secara langsung. Jeje menjadi salah satu Pembina KUD Minasari, bahkan memfasilitasi usaha KUD yang semula hanya menyediakan kebutuhan (alat-alat mata pencaharian nelayan) untuk para nelayan, akhirnya dapat mengembangkan usahanya tidak saja untuk kalangan nelayan tapi juga untuk masyarakat lainnya. KUD Minasari usahanya berkembang menjadi koperasi simpan pinjam, jual beli produk hasil nelayan, kebutuhan pokok masyarakat dan usaha restoran (rumah makan). Jumlah anggota KUD Minasari juga semakin bertambah dan beragam dari berbagai kalangan masyarakat seiring dengan semakin beragamnya usaha yang dikembangkan oleh KUD tersebut.

Selain berinteraksi dengan komunitas-komunitas masyarakat, semasa Jeje menjadi politisi di DPRD Kabupaten Ciamis (1999-2009) juga berinteraksi dengan kalangan pesantren dan masyarakat secara perorangan. Jeje sering menghadiri undangan pengajian masyarakat maupun yang diadakan pesantren-pesantren, undangan dari RT-RW, bahkan acara apapun yang diadakan masyarakat kecil pun Jeje sering hadir.

Dari berbagai interaksi yang dilakukan Jeje tersebut, menunjukkan adanya pemanfaatan dan optimalisasi peran Jeje sebagai pejabat politik dan pejabat pemerintahan dalam membangun relasi sosial dan relasi ekonomi dengan masyarakat Pangandaran. Hal tersebut berdampak pada terbentuk dan tumbuhnya modal sosial Jeje sebagai sosok pemimpin yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya. Kondisi ini memberikan kontribusi yang kuat dalam mempengaruhi dukungan atau modal sosial Jeje dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran Tahun 2015.

Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa salah satu faktor terbentuknya modal

sosial kandidat yang akan mengikuti kontestasi politik adalah adanya interaksi sosial yang dilakukannya dengan pemilihnya, dimana interaksi yang telah dilakukan tersebut menjadi salah satu bentuk penilaian warga masyarakat, baik penilaian yang bersifat positif maupun bersifat negatif yang akan mempengaruhi dukungan masyarakat tersebut terhadap sosok calon pemimpin bagi mereka. Interaksi yang baik akan memberikan pengaruh positif bagi terbentuknya modal sosial kandidat, sebaliknya interaksi yang kurang baik akan memberikan pengaruh negatif (hilang/ berkurangnya/tidak adanya) modal sosial bagi kandidat tersebut.

Dari paparan di atas dapatlah ditunjukkan juga adanya hubungan *patronase* dimana bentuk perolehan modal sosial Jeje-Adang dapat dilihat dengan cara mengaktivasi norma-norma sosial tentang ucapan terima kasih, timbal balik, dan kewajiban personal, sehingga mendorong para penerima pemberian untuk membalas pemberian. Para kandidat juga berusaha membangun relasi klientelistik dengan para penerima keuntungan dari politik *patronase* ini atau melalui perantara dan jaringan sosial yang dapat dipercaya dan yang telah memiliki relasi personal cukup dekat dengan pemilih (Aspinal dan Sukmajati 2015: 22-23).

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Scott, dimana dalam proses perolehan modal sosial, umumnya terjadi hubungan *patronase*. Menurut Scott (1972: 92), *patronase* adalah:

“The patron-client relationship—an exchange relationship between roles—may be defined as a special case of dyadic (two person) ties involving a large instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron”.

Patronase merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara *patron* di satu pihak dan *klien* di pihak yang lain. Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Karena itu, dalam fenomena seperti ini interelasi telah diikat oleh kepentingan dan tujuan

masing-masing walaupun kedua-duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang.

Menurut Lande (1977: xx), relasi *patronase* ini adalah sebagai berikut:

“A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e., an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as an ally someone superior member of such an alliance is called a patron. The inferior member is called his client”.

Merujuk pada uraian di atas, *patronase* mewujud karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Di satu pihak, *patron* muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Di lain pihak, *klien* hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber-sumber daya yang dimiliki seorang *patron*. Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan “pertukaran kepentingan”. Asumsi tersebut meletakkan cara berpikir yang menandakan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin.

Adanya pola interaksi antara Jeje-Adang dengan masyarakat dan komunitas-komunitas masyarakat menunjukkan terjalannya hubungan *patronase* antara kedua pihak tersebut. Masyarakat sangat tergantung dan berharap terhadap Jeje-Adang tersebut sebagai pimpinan daerah bagi Daerah Pangandaran yang baru terbentuk, karena sosok keduanya yang dekat secara sosial dan emosional dengan masyarakat (komunitas masyarakat) pendukungnya sebagai dampak dari interaksi yang telah lama terjalin di antara mereka selama ini, dimana Jeje dan Adang banyak membantu secara sosial dan ekonomi kehidupan masyarakat Pangandaran.

Jaringan-jaringan Sosial yang Mendukung Jeje-Adang

Menurut Bourdieu (1992), modal sosial merupakan kumpulan sejumlah sumberdaya, baik aktual maupun potensial yang terhubung dengan kepemilikan jaringan atau relasi, yang sedikit banyak telah terlembaga dalam pemahaman dan pengakuan bersama. Modal sosial merujuk kepada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungannya dengan pihak lain yang memiliki kuasa.

Jaringan sosial merupakan salah satu unsur modal sosial yang berkontribusi terhadap kesuksesan kandidat (pasangan calon) dalam pilkada, sebagaimana dikemukakan oleh Agusyanto (2011: 41-54), bahwa prinsip-prinsip hubungan sosial dalam jaringan sosial masyarakat

pemilih sangat mempengaruhi bahkan menentukan kesuksesan seorang kandidat kepala daerah dalam memenangkan sebuah pilkada, sebab dengan memahami hakekat dari hubungan-hubungan sosial tersebut dapat dibuat prediksinya tentang logika situasional (aturan-hukum-norma) yang diciptakannya, jenis kontrol dan jenis-jenis pertukarannya yang berguna untuk: (1) merumuskan program-program dan strategi pemenangan pilkada yang tepat; (2) merumuskan materi kampanye yang signifikan; (3) memanfaatkan aktor-aktor yang mempunyai posisi-posisi penting (*broker/jembatan, star/patron* atau *cut points*): (a) sebagai chanel-chanel komunikasi yang berguna untuk pembentukan *image* atau pencitraan seorang kandidat; (b) serta berguna untuk membangun kesepakatan-kesepakatan demi perolehan suara yang maksimal.

Terkait dengan jaringan sosial sebagai salah satu unsur dari modal sosial, juga dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Putnam (dalam Field, 2010: 52), bahwa ada dua bentuk dasar modal sosial; yang menjembatani atau (inklusif) dan mengikat (eksklusif). Modal sosial yang mengikat cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas; modal sosial yang menjembatani cenderung menyatukan orang dari beragam ranah sosial. Masing-masing bentuk tersebut membantu menyatukan kebutuhan yang berbeda.

Modal sosial yang mengikat adalah sesuatu yang baik untuk ‘menopang resiprositas spesifik dan memobilisasi solidaritas’, sambil pada saat yang sama menjadi ‘semacam perekat terkuat sosiologi’ dalam memelihara kesetiaan yang kuat di dalam kelompok dan memperkuat identitas-identitas spesifik. Hubungan-hubungan yang menjembatani ‘lebih baik dalam menghubungkan aset eksternal dan bagi persebaran informasi’, yang dapat membangun identitas dan resiprositas yang lebih luas (Field, 2010: 52).

Dari apa yang dikemukakan Putnam dapatlah dijelaskan bahwa jaringan sosial (komunitas-komunitas sosial/komunitas masyarakat) terkait dengan bentuk dasar modal sosial yang mengikat (eksklusif), dimana dalam komunitas tersebut identitas anggota-anggotanya cenderung homogen atau sama dalam satu komunitas, misalnya HNSI Pangandaran anggotanya terdiri dari nelayan seluruh Pangandaran. Begitu juga untuk komunitas Nahdatul Ulama, anggota adalah kalangan

masyarakat yang aktif dalam bidang keagamaan islam.

Dalam konteks pilkada, modal sosial yang mengikat (eksklusif) pada dasarnya menjadi salah satu bentuk kekuatan komunitas masyarakat yang dapat digerakkan untuk mendukung salah satu kandidat (pasangan calon) yang mengikuti kontestasi politik. Dukungan komunitas tersebut biasanya karena dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu: Pertama, adanya kedekatan sosial dan emosional dalam interaksinya selama ini antara kandidat (calon/pasangan calon) dengan komunitas tersebut; Kedua, karena visi, misi dan program-program kandidat yang didukungnya cenderung mendukung kepentingan komunitas tersebut; Ketiga, adanya aktor jaringan sosial (komunitas sosial/komunitas masyarakat) yang memiliki hubungan baik dengan kandidat (calon/ pasangan calon); Keempat, dilakukannya kesepakatan yang saling menguntungkan dengan dibuatnya komitmen bersama antara jaringan sosial (komunitas-komunitas masyarakat) dengan kandidat (calon/ pasangan calon).

Berdasarkan hal tersebut, maka bila dikaitkan dengan konteks dukungan jaringan sosial (komunitas-komunitas masyarakat) yang mendukung Jeje-Adang dalam pilkada Pangandaran tahun 2015, dapatlah dilihat sebagai kekuatan modal sosial yang dimiliki pasangan tersebut.

Jeje-Adang memiliki modal sosial yang cukup besar dalam pilkada Pangandaran tahun 2015. Salah satu unsur modal sosial tersebut adalah banyaknya dukungan komunitas masyarakat Pangandaran terhadap pasangan tersebut. Hampir semua komunitas masyarakat Pangandaran cenderung mendukung Jeje-Adang dalam Pilkada Pangandaran. Walaupun beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) dan komunitas masyarakat bersikap independen, namun anggota-anggotanya secara perorangan menunjukkan dukungannya terhadap Jeje-Adang dengan membentuk Tim Relawan (Tim Relawan JIHAD, Taruna Nelayan, Taruna Rimba, Pangandaran Hebat, dan sebagainya).

Peran berbagai komunitas yang mendukung Jeje-Adang, baik secara terang-terangan maupun tidak, maupun dukungan anggota-anggota komunitas secara perorangan dengan menjadi Tim Relawan, turut berkontribusi sebagai salah satu unsur yang membantu Tim Pemenangan Jeje-Adang dalam menjalankan strategi pemenangannya, dimana komunikasi politik dan

konsolidasi politik menjadi bentuk strategi yang paling sering dilakukan oleh Jeje-Adang, Tim Pemenangan dan Tim Relawan dengan berbagai komunitas masyarakat maupun dengan berbagai kalangan masyarakat perorangan.

Banyaknya dukungan komunitas masyarakat terhadap Jeje-Adang menunjukkan besarnya modal sosial pasangan tersebut dalam pilkada Pangandaran. Besarnya modal sosial tersebut dipertahankan dan dioptimalisasikan melalui seringnya strategi komunikasi politik, konsolidasi politik dan interaksi langsung Jeje-Adang dengan pendukung (calon pemilihnya), yang dijembatani dengan seringnya pertemuan terbatas antara Jeje-Adang, Tim Pemenangannya (Tim Pemenangan Tingkat Kabupaten, Tim Pemenangan Tingkatan Kecamatan, Tim Pemenangan RW dan Dusun), Tim Relawan dengan komunitas-komunitas masyarakat, dimana ajang pertemuan tersebut selain untuk melakukan konsolidasi politik, juga untuk mensosialisasikan visi, misi dan program-program unggulan Jeje-Adang.

Dari uraian di atas, dapatlah dilihat bahwa adanya jaringan-jaringan sosial (komunitas-komunitas sosial) dan tim relawan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi optimalisasi modal sosial Jeje-Adang, dimana melalui interaksi dan dukungan komunitas-komunitas dan tim relawan dalam pilkada, di satu sisi dapat membantu Tim Pemenangan pasangan tersebut dalam mensosialisasikan dan menyampaikan visi, misi dan program-program unggulan Jeje-Adang ke masyarakat melalui komunitas-komunitas masyarakatnya (sehingga komunitas tersebut juga dapat menjadi komunikator sekaligus komunikator politik yang akan menyampaikan visi, misi dan program-program unggulan Jeje-Adang ke kalangan pemilih lain/ anggota keluarga/ tetangganya, dan sebagainya), sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kampanye pasangan tersebut; di sisi lain, dengan melakukan konsolidasi politik dan interaksi dengan jaringan-jaringan sosial (komunitas masyarakat) yang mendukungnya, menunjukkan besarnya modal sosial Jeje-Adang kepada publik dan dipercayainya pasangan tersebut oleh masyarakat (yang terwakili melalui komunitas-komunitas masyarakat Pangandaran). Hal tersebut dapat mempengaruhi dukungan masyarakat yang masih belum menentukan pilihannya maupun dukungan calon pemilih pihak pasangan calon yang lainnya dalam pilkada Pangandaran tahun 2015.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Jeje-Adang dinilai memiliki figur pemimpin yang baik yang dapat mengayomi dan memahami karakteristik dan kondisi masyarakatnya serta dinilai memiliki integritas dalam kiprahnya sebagai tokoh masyarakat maupun sebagai politisi dan praktisi pemerintahan. Hal tersebut yang menjadikan keduanya dipercaya dan didukung oleh masyarakat (baik masyarakat secara perorangan maupun komunitas-komunitas) untuk menjadi calon pemimpin daerah di Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian, keduanya memiliki modal sosial yang cukup besar untuk mengikuti kontestasi politik (pilkada) Kabupaten Pangandaran tahun 2015.

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Jeje-Adang disebabkan kedekatannya secara fisik, sosial dan emosional yang sudah terbangun beberapa tahun sebelumnya. Kepercayaan tersebut yang menjadi modal sosial Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran, yang menjadi salah satu latar belakang diusung dan didukungnya Jeje-Adang oleh partai-partai politik besar di Pangandaran (yang mempengaruhi perolehan modal politik), dan yang menjadi faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan tersebut dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015.

Interaksi sosial yang dilakukan Jeje dan Adang dengan masyarakat Pangandaran menjadi salah satu faktor terbentuknya perolehan modal sosial Jeje dan Adang, yang sudah dibangunnya beberapa tahun sebelum Pilkada Pangandaran tahun 2015. Pola interaksi antara Jeje-Adang dengan masyarakat dan komunitas-komunitas masyarakat menunjukkan terjalinnya hubungan *patronase* antara kedua pihak tersebut.

Adanya jaringan-jaringan sosial (komunitas-komunitas sosial) dan tim relawan mempengaruhi optimalisasi dan akumulasi modal sosial Jeje-Adang, yang dalam masa pilkada Pangandaran 2015 membantu Tim Pemenangan pasangan tersebut dalam mensosialisasikan dan menyampaikan visi, misi dan program-program unggulan Jeje-Adang ke masyarakat melalui komunitas-komunitas masyarakatnya.

Signifikansi temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa kontestasi politik lokal (pilkada) umumnya tidak bisa diperoleh melalui "jalan pintas" untuk mencapai kemenangan, dimana modal sosial yang dimiliki kandidat menempati

posisi penting sebagai modal yang mempengaruhi berhasilnya kandidat dalam kontestasi politik tersebut. Proses perolehan modal sosial tidaklah didapat secara instan, namun dilakukan dalam proses yang relatif cukup lama yang di dalamnya membentuk berbagai relasi antara kandidat dengan masyarakat pendukungnya (sesuai dengan kedudukan dan peran yang dijalankan kandidat), yang bila dioptimalkan dan dimanfaatkan dengan baik oleh kandidat, akan turut menentukan menangnya kandidat dalam arena politik lokal (pilkada).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2010). *Pemasaran Politik dan Politik Kepartaian di Indonesia, Kajian Pemilihan Umum Tahun 2009 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Desertasi Doktor, Universiti Utara, Malaysia.
- Agusyanto, R. (2011). "Dukungan Politik dan Jaringan Komunikasi Sosial: Kasus Pemilihan Kepala Daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan". *Journal Communication Spectrum*, 1, (1), 41-54.
- Arwantinna, M. (2013). Kemenangan Anton-sutiaji (Aji) Dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Malang Tahun 2013. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1, (1), 1-15.
- Aspinal, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov.
- Baharuddin, T. & Purwaningsih, T. (2017). "Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Kasus: Indah Putri Indriani sebagai Bupati Terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan)", *Journal of Governance And Public Policy*, 4, (1), 205-237.
- Birner, R., & Wittmer, H. (2012). *Coverting Social Capital into Political Capital. How do local communities gain political influence? A theoretical approach and empirical evidence from Thailand and Columbia*. Paper submitted to the 8th Biennial Conference of the International Association for the Study of Common Property (IASCP).
- Bourdieu, P. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Field, J. (2010). *Social Capital*. Terjemahan Nurhadi. *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas* Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*. Yogyakarta: LP2B.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). Ed. Ketiga, Cet. Kelima, Jakarta: Balai Pustaka.
- KPU Kabupaten Pangandaran. (2016). *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015*. Pangandaran: KPU Pangandaran.
- Lande, C.H. (1977). "Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism". Dalam Steffen W. Schmidt & J.C. Scott (Eds). *Friends, Followers and Factions a Reader in Political Clientalism*, xiii-xxxvii. Barkeley: University of California Press.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M.B., & Huberman, M. (1992). *Analisis data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2009). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Putri, M., & Qodir, Z. (2017). "Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015". *Journal of Governance And Public Policy*, 4, (1), 142-173.
- Scott, J.C. (1972). Patron-Client politics and Political Change in Shoutheast Asia. *American Political Science Review*, 66, (1), 91-113.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rahmatunnisa, M. (2018). "Jeje-Adang's Capital Relations in Local Election of Pangandaran Regency". *Jurnal Mimbar*, 34, (2), 378-388.